

Draft awal
CATATAN DAN REKOMENDASI LKPJ
TAHUN 2018
BIDANG PEMERINTAHAN
(PROGRAM SINERGITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH)

PENDAHULUAN

Dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam pembahasan LKPI memperhatikan :

1. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
2. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Tahun 2018 terdapat 12 Program Pemerintah Daerah, dengan total indikator sebanyak 31 indikator. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2018, menunjukkan bahwa Jumlah Indikator yang tercapai ($\geq 100\%$) sebanyak 22 indikator dan tidak tercapai ($<100\%$) sebanyak 9 indikator. Dari 9 Indikator yang tidak tercapai, diantaranya adalah:

nilai eksternal pelayanan public dari target 8,43 realisasinya adalah 8,50 atau 97.41 %.

Nilai eksternal pelayanan publik masuk dalam indikator kinerja Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah .

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah merupakan program strategis Pemda DIY yang mendukung sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu :

1. kemampan keuangan daerah,
2. optimalisasi aset-aset Pemda DIY,
3. nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi, dan
4. nilai eksternal persepsi korupsi.

Dari ke empat indicator tersebut yang belum tercapai target adalah Nilai eksternal pelayanan publik.

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM SINERGITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

•Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 4.54. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Sumber: BPKA DIY, 2019

Tingkat kemampuan keuangan daerah pada posisi sedang tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. (Sesuai dengan Permendagri No. 62 Tahun 2017).

•Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY

Tabel 4.56. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 serta Capaian 2018 Terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	n/a	9.424.672 .744,00	19.033.326 .876,00	201,95	9.626.994 .395,00	197,7

Sumber: BPKA DIY, 2019

Berbagai faktor yang mempengaruhi tercapainya target optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah adalah:

1. Adanya penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah yakni dengan adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
2. Adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pemanfaatan barang milik daerah,
3. Adanya upaya intensifikasi dalam pemungutan dan penagihan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah

Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi

Tabel 4.58. Capaian Indikator Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi

No	Indikator	Capaian 2016	Capaian 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target Akhir RPJMD
1.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	8,44	8,43	8,50	8,28*	8,8
2.	Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,03	4,20	4,86*	4,6
3.	Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,62	5,40	5,81*	6

Sumber: Kemen PAN-RB, 2019 (*diolah)

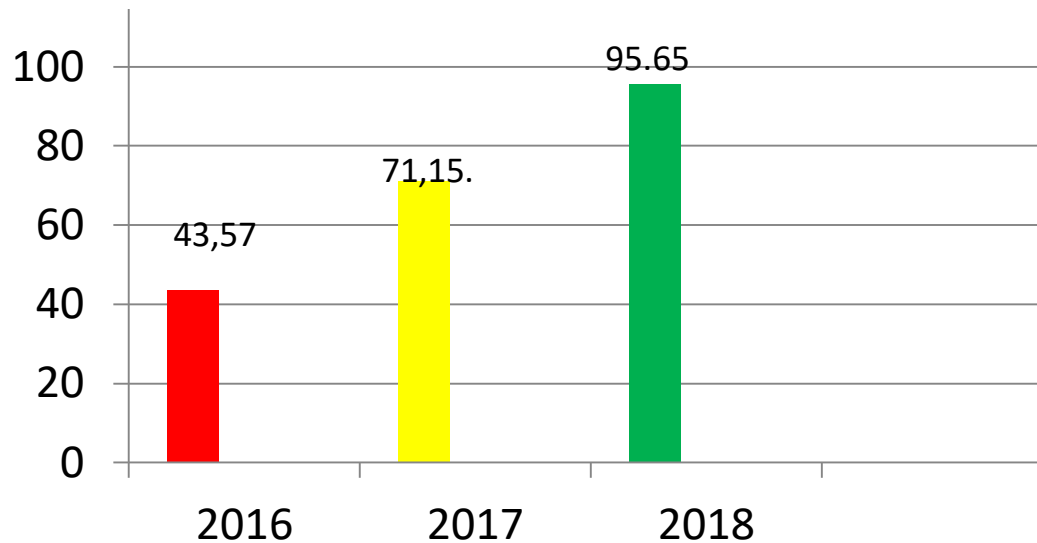
Nilai eksternal pelayanan publik menggambarkan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Dengan demikian dengan realisasi yang tidak memenuhi target ternyata masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih lanjut.

CATATAN

Pelayanan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara jelas pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang memberikan penjelasan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas **barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.**

Pemda DIY telah memiliki Perda DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik . Namun dari capaian indikator Nilai Eksternal Pelayanan Publik belum memenuhi target , walaupun Nilai capaian di atas merupakan olahan sementara dari hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB . Dengan demikian perlu adanya komitmen dari Pimpinan Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

TINGKAT KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH DIY TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK



Hasil penilaian yang diperoleh DIY menunjukkan adanya peningkatan dan keseriusan

Dilain pihak dalam layanan publik masih terdapat permasalahan seperti pelayanan terhadap kebersihan yang terkait dengan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi problematika mengingat bahwa timbunan sampah perhari di DIY mencapai sekitar 2.100 ton, besarnya sampah itu menjadikan TPA Piyungan kini overload . Disisi lain pemda DIY telah memiliki Perda Prov DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun faktanya terjadi overload sampah di TPA Piyungan yang dapat berdampak pada Lingkungan dan Manusia seperti Kesehatan maupun pencemaran serta keindahan

•REKOMENDASI

1. Memperkuat fungsi koordinasi yang dilakukan oleh gubernur untuk memperkuat komitmen dari kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Perda DIY No. 5 Tahun 2014 tentang pelayanan publik di wilayah masing-masing;
2. Optimalisasi dalam implementasi Perda DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga atau dilakukan peninjauan terhadap Perda tersebut.
3. Perlu teknologi tinggi dalam pengolahan sampah dan terus dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah.